

BAB II

KERJA SAMA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL JEPANG DI

INDONESIA

Hubungan Jepang dan Indonesia diawali peristiwa penjajahan Jepang di Indonesia pada tahun 1942. Hubungan tidak baik tersebut berakhir di tahun 1945, disertai adanya kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Perginya Jepang dari Indonesia serta kekalahannya di dalam Perang Dunia II menciptakan berbagai perubahan bagi Jepang. Jepang dengan berbagai tekanan dari barat berusaha untuk mempertahankan kedudukannya sebagai negara kuat di Asia. Jepang mengubah kebijakannya untuk berfokus pada bidang ekonomi.

Berfokusnya Jepang pada bidang ekonomi menciptakan kekuatan baru bagi Jepang. Jepang terlahir kembali menjadi negara pemberi bantuan luar negeri kepada negara-negara berkembang. Hal ini terbukti dari adanya berbagai bantuan luar negeri yang diberikan Jepang kepada Indonesia maupun negara lainnya di Asia Tenggara. Melalui bantuan luar negeri Indonesia dan Jepang menjalin hubungan yang lebih baik daripada sebelumnya. Di tahun 1958 Jepang dan Indonesia menandatangani hubungan diplomatiknya. Jepang memberikan berbagai bantuan luar negeri serta mendirikan berbagai kerja sama dengan Indonesia setelah ditandatanganinya hubungan diplomatik tersebut. Jepang memiliki berbagai

kepentingan yang ingin dicapai melalui pemberian bantuan luar negeri serta meningkatkan kerja sama internasional dengan Indonesia.

Bab ini membahas tentang sejarah ODA (*Official Development Assistance*) Jepang serta sejarah bantuan luar negeri Jepang di Indonesia. Sejarah bantuan luar negeri Jepang di Indonesia juga dibahas dari masa Orde Lama hingga Reformasi. Bab ini terdiri dari tiga subbab yaitu sejarah *Official Development Assistance* (ODA) Jepang, sejarah bantuan luar negeri Jepang di Indonesia, serta kesimpulan.

2.1 Sejarah Official Development Assistance (ODA) Jepang

Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II membawanya ke dalam berbagai keuntungan. Perjanjian San Francisco yang menjadi tanda kekalahan Jepang akan sekutu justru memberikan dorongan perubahan kepada Jepang. Salah satu isi dari Perjanjian damai San Francisco yaitu Jepang dilarang untuk menggunakan kekuatan militernya baik darat, laut, maupun udara serta potensi lainnya yang dianggap dapat menimbulkan perang kembali. Perdana Menteri Shigeru Yoshida membuat kebijakan untuk memfokuskan pertumbuhan serta pembangunan ekonomi industri serta infrastruktur yang mengalami kehancuran. Kehancuran tersebut merupakan akibat pengeboman yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Yoshida menyerahkan berbagai kepentingan militer Jepang kepada Amerika Serikat. Hal tersebutlah yang membuat Amerika Serikat memiliki pangkalan militernya di wilayah Jepang. Yoshida memilih untuk fokus terhadap pembangunan ekonomi karena adanya kewajiban Jepang terhadap negara-negara yang pernah

dijajahnya. Kewajiban tersebut adalah memberikan uang kompensasi sebagai ganti rugi dan pertanggungjawabannya sebagai pihak yang kalah dalam perang (Seniwati, 2021).

Kewajiban untuk memberikan uang kompensasi kepada negara bekas jajahannya merupakan jalan yang tepat untuk membentuk hubungan bilateral bagi Jepang. Target penting dari pemberian uang kompensasi ini adalah Indonesia dan Filipina. Melalui pemberian uang kompensasi ganti rugi ini, Jepang menginginkan adanya perbaikan politik serta hubungan diplomatik antara Jepang dan negara-negara di Asia Tenggara. Namun kurangnya persiapan Jepang dalam ekonomi membuat rencana tersebut kurang berjalan dengan baik. Pemerintah Indonesia dan Filipina menuntut sejumlah dana yang tidak dapat dipenuhi oleh Jepang. Ketiga negara tersebut melakukan perundingan hingga akhirnya didapatkan kesepakatan mengenai sejumlah dana yang harus dibayarkan serta penetapan hubungan diplomatik (Katada, 2000).

Colombo Plan menjadi titik pertama bergabungnya Jepang ke dalam organisasi pembangunan ekonomi dan sosial di Asia Pasifik. Organisasi ini terdiri dari negara-negara pemberi bantuan luar negeri serta penerima bantuannya. Negara pemberi donor terdiri dari Australia, New Zealand, Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang. Sedangkan negara penerima donor terdiri dari Myanmar, Kamboja, Sri Lanka, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Nepal, Pakistan, Filipina, Sarawak, Singapura, Thailand, dan Vietnam (Bryant, 1961). Jepang memberikan bantuan luar negerinya melalui Colombo Plan pertama kali yaitu pada tahun 1954. Keikutsertaan Jepang di dalam Colombo Plan sebagai negara donor menjadi tanda keseriusan

Jepang untuk menunjukkan perbaikan serta perkembangan perekonomiannya di ranah internasional.

ODA bagi Jepang merupakan salah satu instrumen dalam rangka memperjuangkan kemajuan perekonomiannya. Selain ODA, Jepang juga mengimplementasikan beberapa kebijakan ekonomi seperti meningkatkan volume ekspor komoditi dan investasi. ODA serta kebijakan investasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Jepang menyebarkan berbagai investasinya ke berbagai negara, nantinya hasil dari investasi tersebut menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan ODA (Raymon, 2009). Kebijakan pemberian bantuan luar negeri menjadi alat terpenting bagi Jepang di dalam ranah internasional. Jepang memiliki pemikiran bahwa bantuan luar negeri merupakan alat diplomasi terpenting di era abad 20, yang mana nantinya akan membawanya kesuksesan di abad ke-21 (Yasutomo, 1989).

Terdapat empat tahapan ODA Jepang, yaitu tahap pertama ketika awal dari kekalahan Jepang di dalam Perang Dunia II. Tahap kedua dimulai pada tahun 1954 yaitu ketika Jepang pertama kali bergabung dengan Colombo Plan. Tahap ketiga yaitu ketika Jepang berhasil menyelesaikan kewajibannya dalam memberikan kompensasi ganti rugi kepada negara-negara jajahannya terdahulu. Serta tahap keempat yaitu ketika Jepang berhasil menjadi negara pemberi bantuan luar negeri terbesar di tahun 1989 (Fujisaki, 1996a).

Tahap pertama yaitu ketika Jepang harus mengakui kealahannya akan sekutu di dalam Perang Dunia II. Pada masa ini Jepang sama seperti negara-negara

yang baru merdeka yaitu membutuhkan bantuan dari negara lainnya. Jepang menerima bantuan luar negeri dari Amerika Serikat pada tahun 1946 dan 1951. Di tahap kedua yaitu ketika Jepang berusaha untuk bergabung dengan Colombo Plan pada tahun 1954. Selain bergabung dengan Colombo Plan, di tahun tersebut Jepang juga harus memberikan kompensasi ganti rugi atas kekalahan perang kepada negara-negara yang pernah dijajahnya. Di masa ini Jepang berusaha untuk meningkatkan perekonomiannya walaupun Colombo Plan mulai memperlihatkan adanya perang dingin di antara dua blok (Akita dan Krozewski, 2014).

Di tahap ketiga yaitu ketika Jepang sudah selesai dalam kewajibannya membayar kompensasi kerugian perang. Di tahap ini ODA Jepang memiliki tujuan lain selain untuk memperkuat perekonomiannya yaitu untuk melindungi berbagai kepentingan negara barat (Miyashita, 1999). Pada tahap keempat yaitu tahap keberhasilan Jepang menjadi negara pemberi bantuan luar negeri terbesar di dunia, bahkan mengalahkan Amerika Serikat. Walaupun di masa ini mayoritas bantuan Jepang diberikan kepada wilayah Asia dan tidak banyak negara yang berasal dari luar Asia (Fujisaki, 1996b).

Perdana Menteri Yoshida Shigeru memilih untuk fokus terhadap pembangunan ekonomi Jepang setelah kekalahannya di dalam Perang Dunia II. Pembangunan ekonomi ini mengantarkan hubungan internasional Jepang, serta terciptanya hubungan bilateral dengan berbagai negara terutama negara-negara yang pernah dijajahnya. ODA menjadi instrumen utama dalam kemajuan perekonomian Jepang. Dana ODA bersumber dari kebijakan investasi Jepang di berbagai negara, sehingga ODA dan kebijakan investasi merupakan dua hal yang

saling bergantung. Hal tersebut membuat ODA dan investasi Jepang akan terus berjalan beriringan sejalan dengan hubungan bilateral Jepang dengan berbagai negara.

2.2 Sejarah Bantuan Luar Negeri Jepang di Indonesia

Hubungan baik antara Jepang dan Indonesia bermula dari adanya perjanjian damai yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat setelah Perang Dunia II. Perjanjian damai San Francisco yang dilaksanakan pada 8 September 1951 ternyata dapat mempertemukan Indonesia dan Jepang, serta menjadi awal mula perdamaian kedua negara tersebut. Jepang menjelma menjadi negara yang kuat akan perekonomiannya akibat dari perjanjian damai San Francisco. Bantuan luar negeri Jepang kepada Indonesia pertama kali terjadi pada tahun 1954. Jepang memberikan bantuan berupa pelatihan atau *trainee* di bidang industri, komunikasi transportasi, pertanian, dan kesehatan kepada masyarakat Indonesia saat itu (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, n.d.-c). Jepang sangat membantu Indonesia untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya. Bantuan luar negeri Jepang kepada Indonesia tidak berhenti di tahun 1954, Jepang dan Indonesia memutuskan untuk membangun hubungan diplomatik empat tahun kemudian yaitu tahun 1958.

Hubungan antara Jepang dan Indonesia sudah terjalin sebelum diadakannya Perjanjian San Francisco. Hal ini dapat terlihat dari adanya bantuan luar negeri Jepang kepada Indonesia pada tahun 1954. Hubungan antara Indonesia dan Jepang

kembali terlihat di tahun 1957 dengan adanya penugasan tenaga ahli Jepang di Indonesia (Japan International Cooperation Agency, n.d.-b). Jepang tidak memiliki dana yang cukup banyak pada awal kebangkitannya, hal tersebut membuat Jepang hanya mampu memberikan bantuan perbaikan sumber daya manusia kepada Indonesia. Indonesia yang pada saat itu baru mendapatkan kemerdekaannya membuat Jepang berkontribusi besar pada pengembangan sumber daya manusia, pembangunan, dan infrastruktur sosial ekonomi di Indonesia (Ranti, 2018).

Prinsip non blok yang diteguhkan Indonesia menimbulkan perbedaan pendapat pada kehadiran Indonesia di dalam perjanjian San Francisco. Partai Nasional Indonesia (PNI) melihat tidak adanya manfaat bagi Indonesia jika menghadiri perjanjian tersebut, namun berbanding terbalik dengan pandangan Masyumi. Namun pada akhirnya Indonesia ikut serta menandatangani perjanjian tersebut, tetapi tidak meratifikasinya (Kesavan, 1972). Indonesia justru membangun perjanjian bilateral serta hubungan diplomatik pasca menandatangani perjanjian tersebut. Indonesia melihat adanya berbagai keuntungan yang akan diterima jika bersedia untuk membangun hubungan bilateral dengan Jepang. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang dimulai pada tahun 1958.

Hubungan diplomatik tersebut ditandai dengan adanya penandatanganan perjanjian damai antara Indonesia dan Jepang, yang mana ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian San Francisco. Perjanjian di antara keduanya menciptakan kesepakatan bahwa Jepang bersedia untuk mengganti pampasan perang senilai US\$ 223,080 juta, serta adanya penanaman modal dan mengusahakan pinjaman jangka panjang sampai batas US\$ 400 juta (Isnaeni, 2010). Bantuan luar negeri Jepang

melalui ODA kepada Indonesia terus berjalan dan mayoritas berbentuk pinjaman. Bahkan pada saat krisis keuangan melanda Asia, Jepang masih bersedia untuk memberikan bantuan ODA kepada Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat penting bagi Jepang, sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia sebagai penerima bantuan luar negeri Jepang yang terbesar di antara negara-negara ASEAN. Jepang memfokuskan bantuan luar negerinya kepada Indonesia karena adanya berbagai kepentingan seperti banyaknya kandungan sumber daya alam, potensial pasar ekspor, serta letak geografis yang menjanjikan (Bahri, 2004).

Indonesia kembali menjalin hubungan baik dengan Jepang setelah terlaksananya perjanjian damai San Francisco pada tahun 1951. Bantuan luar negeri Jepang pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1954 dan 1957. Di tahun 1958, Jepang dan Indonesia meresmikan hubungan diplomatiknya. Setelah meresmikan hubungan diplomatik, Jepang memberikan pampasan perang senilai US\$ 223,080 juta kepada Indonesia. Pemberian pampasan perang tersebut menjadi awal masuknya berbagai bantuan luar negeri Jepang di Indonesia.

2.2.1 Masa Orde Lama

Orde Lama yang berada di bawah kepemimpinan Soekarno berjalan dari tahun 1959 hingga 1966. Pada masa ini pula terjadi banyak peristiwa di antara Indonesia dan Jepang, maupun negara-negara lainnya. Pada masa Orde Lama di Indonesia, Jepang mengalami beberapa peristiwa yang dapat dikatakan merugikan namun dapat juga membawa mukzijat bagi negaranya. Walaupun

Jepang tidak lagi diperbolehkan untuk memiliki kekuatan militer, namun Jepang memiliki kesempatan untuk memperbaiki perekonomiannya. Kegigihan Jepang serta adanya bantuan dari Amerika Serikat membuahkan hasil yaitu bergabungnya Jepang ke dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) di akhir tahun 1950-an (Solis, 2019). Pada masa ini pula Jepang mulai memperbaiki hubungan dengan negara-negara di Asia Tenggara, khususnya Indonesia.

Bantuan Jepang pertama kali masuk ke Indonesia di tahun 1954, tepat setelah bergabungnya Jepang dengan Colombo Plan. Bantuan Jepang kepada Indonesia saat itu ialah menerima 15 peserta pelatihan dalam rangka pelatihan bidang industri, transportasi komunikasi, dan pertanian (Japan International Cooperation Agency, n.d.-a). Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II justru membuat hubungan Jepang dan Indonesia semakin membaik. Hubungan di antara keduanya yang semakin membaik terlihat dari adanya perjanjian damai serta kewajiban Jepang dalam memberikan ganti rugi kehancuran dan penderitaan dalam Perang Dunia II kepada Indonesia.

Kekalahan Jepang serta adanya kewajiban untuk mengganti rugi kehancuran dan penderitaan negara yang dirugikan selama Perang Dunia II, membuat Jepang harus memperbaiki perekonomiannya. Ganti rugi yang dibayarkan Jepang kepada pemerintah Indonesia yaitu sebesar 223 juta dollar atau 12% dari tuntutan Indonesia di tahun 1951. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi Indonesia di tahun 1958 karena situasi perekonomian yang semakin sulit akibat dari naturalisasi aset-aset Belanda di Indonesia. Adanya

pemberian uang ganti rugi ini sangat menguntungkan bagi Jepang karena jumlahnya yang kecil serta membuka peluang bagi Jepang untuk menggeser perekonomian Belanda di Indonesia (Utama, 2014a).

Politik bebas aktif Indonesia tetap berjalan walaupun sedang berlangsungnya Perang Dingin. Jepang yang lebih berpihak pada Amerika Serikat tidak mengubah hubungan antara Indonesia dan Jepang. Jepang justru merasa khawatir akan kedudukannya di Indonesia saat perkembangan Partai Komunis Indonesia (PKI) di awal tahun 1960-an. Jepang memilih percaya kepada Soekarno walaupun tetap berhati-hati akan tindakan yang akan diambil Indonesia mengenai keberadaan PKI. Dewi Soekarno memiliki peran cukup penting dalam membantu kerja sama ekonomi antara Jepang dan Indonesia (Utama, 2014b).

Diplomasi ekonomi merupakan jalan *peaceful expansion* dari ekonomi pasar luar negeri yang digunakan oleh Jepang untuk membangun ekonomi nasionalnya (Purbantina, 2013a). Jepang dan Indonesia memiliki hubungan timbal balik di masa Orde Lama. Jepang mendapatkan kepercayaan dari Indonesia untuk melakukan diplomasi ekonomi, sehingga Jepang mampu untuk memperbaiki dan memperluas perekonomiannya di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan Indonesia menjadikan Jepang sebagai pasar penting untuk ekspor sumber daya yang dimilikinya (Padiatra, 2020a). Berbagai bantuan yang diberikan oleh Jepang kepada Indonesia pada masa ini memiliki tujuan untuk memperbaiki nama baik Jepang di kawasan Asia Tenggara serta mendapatkan berbagai keuntungan politik maupun ekonomi.

Jepang menggunakan diplomasi ekonomi sebagai pondasi dalam menjalankan kewajiban reparasi perang serta meningkatkan perekonomiannya. Di tahun 1950-an Jepang mulai mempertimbangkan Asia Tenggara terlebih Indonesia sebagai pemasok bahan mentah serta pangsa pasar bagi produk Jepang (Purbantina, 2013b). Pemberian bantuan luar negeri Jepang di masa ini bertujuan untuk memperbaiki hubungannya dengan negara-negara yang pernah dijajahnya seperti Filipina dan Indonesia. Selain itu adanya kepentingan untuk meningkatkan perekonomian membuat Jepang harus membangun hubungan baik dengan berbagai negara.

Hubungan Jepang dan Indonesia di masa Orde Lama tetap berjalan walaupun maraknya Perang Dingin. Jepang menggunakan hubungan baiknya dengan Indonesia untuk melakukan diplomasi ekonomi. Pemberian bantuan luar negeri serta melakukan investasi merupakan cara yang digunakan oleh Jepang untuk menghimpun kepercayaan asing akan keberhasilannya pasca Perang Dunia II. Hubungan Indonesia dan Jepang pada masa ini memberikan keuntungan ekonomi serta politik bagi kedua belah pihak.

2.2.2 Orde Baru

Indonesia mengalami berbagai peristiwa di masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Akhir tahun 1960-an Indonesia membuka keran investasi terhadap Jepang. Hal ini dikarenakan adanya kondisi perekonomian yang tidak stabil, sehingga menawarkan investasi terhadap asing merupakan

jalan yang terbaik untuk ditempuh Indonesia. Masa-masa tersebut digunakan oleh berbagai perusahaan manufaktur Jepang untuk menginvestasikan dana mereka di Indonesia. Di tahun 1961 hubungan bilateral kedua negara ini semakin terlihat semenjak adanya *Agreement on Amity Relation and Commerce* (Padiatra, 2020b). Investasi asing saat itu dianggap lebih efisien karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk penduduk Indonesia tanpa harus mengeluarkan pembiayaan serta proyek yang besar bagi pemerintah Indonesia (Rizki, 2013).

Treaty of Amity Relation and Commerce merupakan perjanjian yang disetujui oleh Indonesia dan Jepang. Perjanjian tersebut disetujui dalam rangka meningkatkan persahabatan melalui perdagangan yang saling menguntungkan di antara keduanya (Electronic Database of Investment Treaties, n.d.). Berbagai bantuan luar negeri serta investasi Jepang di Indonesia pada masa Orde Baru dianggap hal terpenting dalam melanjutkan perjalanan Indonesia pasca kemerdekaan. Masa pemerintahan Soeharto pembangunan perekonomian sangat diperhatikan dan tanpa terasa telah menciptakan ketergantungan Indonesia dalam bidang perekonomian dan politik dengan negara lain (Ghoshal, 1979).

Indonesia merancang rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pada saat Orde Baru. Repelita merupakan program pembangunan yang dicetuskan oleh Soeharto pada masa jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia. Repelita I yang berlangsung selama 1969-1974 berfokus pada peningkatan kesejahteraan melalui pertanian, industri, dan pendidikan (Rahmawati, 2022).

Pemerintah Jepang memberikan bantuannya kepada Indonesia untuk mencapai berbagai tujuan yang ada di dalam Repelita I. Jepang memberikan pinjaman yen kepada Indonesia dan membantu perluasan jaringan siaran radio dan TV ke seluruh wilayah Indonesia (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, n.d.-b). Indonesia menggunakan siaran radio serta TV untuk menghimpun persatuan rakyat dalam rangka menyukseskan Repelita I.

Peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) merupakan bentuk demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi di tahun 1974. Gerakan ini merupakan salah satu aksi mahasiswa yang menentang datangnya PM Jepang saat itu yaitu Tanaka Kakuei ke Indonesia. Banyaknya penanaman modal asing serta penolakan terhadap pemerintahan Soeharto menjadi penyebab dalam peristiwa Malari. Mahasiswa menganggap masa pemerintahan Soeharto hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pemerataan dan keadilan sosial diabaikan. Modal asing mendominasi perekonomian Indonesia dan menutup kemungkinan pengusaha-pengusaha lokal untuk berkembang. Hal tersebut menyulut amarah mahasiswa sehingga melakukan demonstrasi dan kerusuhan sosial (Situmeang, 2012). Mahasiswa menentang datangnya PM Jepang karena saat itu di Indonesia didominasi oleh bantuan serta banyaknya perusahaan Jepang yang berkembang di dalam negeri.



Gambar 2.1: Peristiwa Malari

Sumber: Sejarah Peristiwa Malari, Malapetaka di Tahun 1974., CNN Indonesia., 2021.

Peristiwa Malari tidak membuat Jepang menghentikan kerja samanya dengan Indonesia. Jepang justru mengubah strateginya dalam bekerja sama dengan Indonesia. Jepang mengeluarkan Doktrin Fukuda sebagai landasan terbarunya akibat dari demonstrasi “anti Jepang”, termasuk peristiwa Malari. Doktrin Fukuda ini dicetuskan oleh Perdana Menteri Takeo Fukuda di dalam pidatonya di Manila. Doktrin ini berfokus pada Asia Tenggara dan mendorong Jepang untuk bertindak lebih halus daripada yang sebelumnya. Kebijakan baru Jepang melalui Doktrin Fukuda mengedepankan unsur *heart to heart* yang mana budaya menjadi salah satu instrumen dalam kerja samanya (Alamsyah, 2018).

Kerja sama Indonesia dan Jepang terus berlanjut dan Jepang mengeluarkan doktrinnya yang ketiga yaitu Doktrin Miyazawa atau *New Miyazawa Initiative*. 3 Oktober 1998 Kiichi Miyazawa yang merupakan

menteri keuangan Jepang saat itu mencetuskan *Miyazawa Initiative*. *Miyazawa Initiative* dicetuskan dalam pertemuan menteri keuangan dan bank sentral dari berbagai negara Asia seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Korea Selatan, dan Thailand. Doktrin Miyazawa merupakan strategi baru Jepang dalam mempertahankan hubungan bilateralnya dengan negara-negara di Asia yang sedang berada di dalam krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 (Hamada, 1999a). Doktrin Miyazawa memberikan bantuan berupa pinjaman yen ke negara-negara Asia senilai US\$ 30 miliar (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2000). Indonesia menerima US\$ 2,4 miliar. Sebelumnya pada bulan Juli 1998 Jepang sudah memberikan bantuan sebesar US\$ 130 juta dan bantuan pangan sebanyak 50.000 ton beras (R. H. Valentine, 2019).

Jepang membentuk Doktrin Miyazawa dengan berbagai tujuan yang ingin dicapai. Salah satu tujuannya adalah memperkuat hubungan Jepang dengan berbagai negara di Asia Tenggara yang berada di bawah tekanan krisis ekonomi (Hamada, 1999b). Dapat dikatakan bahwa Doktrin Miyazawa digunakan oleh Jepang sebagai alat komunikasi dengan berbagai negara. Banyaknya demonstrasi akibat krisis ekonomi di Asia Tenggara membuat Jepang harus mempertahankan kedudukannya di berbagai negara tersebut. Jepang membutuhkan Asia Tenggara terutama Indonesia karena adanya kepentingan ekonomi, seperti kegiatan investasi dan pasar bagi produk-produk Jepang. Hal tersebutlah yang membuat Jepang mengeluarkan kebijakan Doktrin Miyazawa (Hamada, 1999c).

Tujuan Jepang memberikan banyak bantuan dana serta bantuan lainnya kepada Indonesia di masa Orde Baru ini adalah adanya kebutuhan akan sumber daya minyak. Jepang membutuhkan posisi Indonesia yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Selat Lombok. Titik-titik tersebut merupakan jalur perdagangan internasional maupun jalur pengiriman minyak dari Timur Tengah. Selain itu, Indonesia dapat dikatakan sebagai gerbang dari Asia Tenggara. Sehingga adanya hubungan baik antara Indonesia dan Jepang nantinya akan memberikan dampak positif terhadap citra Jepang di kawasan Asia Tenggara (Padiatra, 2020c). Jepang juga menggunakan Indonesia sebagai lahan untuk memasarkan produk atau membuka pasar. Di masa ini juga Indonesia banyak menerima perusahaan-perusahaan asing Jepang. Masuknya perusahaan asing tersebut diakibatkan adanya keterbukaan Indonesia dalam menerima investasi asing di akhir tahun 1960-an. Soeharto yang menginginkan adanya perkembangan ekonomi di Indonesia dengan cara menerima investasi asing. Namun kebijakan tersebut mampu menimbulkan berbagai peristiwa yang dianggap merugikan perusahaan lokal.

Hubungan Jepang dan Indonesia semakin membaik di masa Orde Baru. Indonesia memberikan kesempatan yang besar kepada Jepang untuk melakukan investasi di dalam negeri. Banyaknya investasi asing termasuk Jepang menciptakan amarah warga Indonesia. Peristiwa Malari menentang datangnya PM Jepang Tanaka Kakuei ke Indonesia di tahun 1974. Namun peristiwa tersebut tidak meruntuhkan hubungan baik Indonesia dan Jepang.

Jepang justru menciptakan doktrin Fukuda serta doktrin Miyazawa untuk mempertahankan hubungan ekonomi serta politik dengan Indonesia.

2.2.3 Masa Reformasi

Masa reformasi adalah masa pembaharuan. Banyaknya perubahan serta perbaikan di dalam segala bidang kehidupan dalam bernegara. Masa reformasi dimulai dari jatuhnya Soeharto atau berakhirnya Orde Baru hingga sekarang (Prayitno, 2019). Setelah masa pemerintahan Soeharto, Indonesia sudah berganti lima pemimpin negara.

Masa pemerintahan Bacharuddin Jusuf Habibie dimulai pada Mei 1998 hingga Oktober 1999. B. J. Habibie awalnya adalah wakil presiden Indonesia di masa pemerintahan Soeharto. Namun adanya peristiwa krisis ekonomi serta runtuhnya Orde Baru, membuat B. J. Habibie menggantikan posisi Soeharto sebagai presiden Indonesia yang ketiga. Pada masa kepemimpinannya, B. J. Habibie dihadapkan dengan krisis moneter yang melanda Indonesia. Krisis moneter yang menimpa Indonesia saat itu menimbulkan berbagai dampak di bidang sosial, ekonomi, maupun politik Indonesia. Naiknya harga barang, hilangnya pekerjaan, investasi asing yang pergi merupakan sebagian contoh dari dampak krisis moneter yang terjadi di Indonesia (Tarmidi, n.d.).

Indonesia pada masa krisis moneter meminta bantuan pada IMF (*International Monetary Fund*), untuk menyelesaikan permasalahan krisis moneter yang terjadi di Asia. Saat terjadinya krisis finansial di tahun 1998, nilai mata uang di Asia Tenggara bahkan Jepang juga mengalami penurunan (Aziza dan Fathana, 2019). Namun Jepang tidak meninggalkan Indonesia, masih banyak perusahaan Jepang yang mempertahankan diri walaupun krisis ekonomi melanda Asia (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, n.d.-a). Pada Desember 1998 Jepang memberikan pinjaman yen kepada Indonesia sejumlah 600 miliar yen. Pinjaman tersebut digunakan Jepang sebagai strategi untuk menarik keuntungan dari Indonesia. Uang pinjaman tersebut harus digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan serta layanan dari perusahaan Jepang (Subagyo, 2005). Jepang tetap memiliki maksud terselubung dari pinjamannya kepada Indonesia, yaitu untuk mendapatkan berbagai keuntungan secara politik dan ekonomi.

Indonesia pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan nama Gusdur menggunakan politik luar negeri diplomasi integrasi. Indonesia melakukan kunjungan ke berbagai negara guna menghimpun dukungan atas integrasi. Perjalanan Abdurrahman Wahid ini menghasilkan dukungan dari beberapa negara seperti Amerika Serikat, Eropa, Australia, Jepang, Tiongkok, dan negara-negara ASEAN (DPR-RI, 2001).

Pada 15-16 November 1999 Abdurrahman Wahid membentuk penasehat yang bernama *Japan-Indonesia Advisory Network* (JIANT). JIANT berisikan

lima pakar perwakilan dari kedua negara tersebut. JIANT memiliki tugas untuk memberikan saran serta tanggapan kepada kepala pemerintahan Indonesia dan Jepang dalam mengambil kebijakan bersama. Jepang memberikan berbagai bantuannya di masa-masa krisis ekonomi serta disintegrasikan di Indonesia saat itu. Jepang merupakan negara yang penting bagi Indonesia, hal ini disebabkan karena sebagai salah satu negara pemberi donor terbesar, penyumbang investor terbesar, serta pasar untuk komoditi migas maupun non-migas (Ridwan dan Supono, 2001a).

Tujuan Jepang tetap bekerja sama dengan Indonesia di masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid adalah untuk mendapatkan keuntungan perekonomian. Hubungan bilateral Jepang dan Indonesia yang sudah terjalin sejak lama memberikan berbagai keuntungan bagi Jepang. Pada masa krisis finansial di Indonesia pun Jepang tidak meninggalkan Indonesia begitu saja, namun tetap memberikan bantuan serta menjalankan kerja sama ekonomi. Jepang selalu mendapatkan surplus dari perdagangannya dengan Indonesia (Ridwan, Iwan. Djoko Supono, 2001b).

Di masa kepemimpinan Megawati, Indonesia dan Jepang banyak melakukan kerja sama di bidang pariwisata dan ekonomi. Kerja sama di bidang pariwisata ini ditandatangani oleh Megawati Soekarno Putri pada 23 Juni 2003 di Jepang. Hal yang menjadi ketertarikan masyarakat mancanegara akan Indonesia adalah wisata alam serta banyaknya kebudayaan. Di masa kepemimpinan Megawati Indonesia menempati nomor urut empat sebagai negara yang banyak diminati oleh wisatawan mancanegara. Megawati

percaya bahwa melalui pariwisata Indonesia dapat mendorong perekonomian negara serta global. Melalui kerja sama pariwisata ini kedua negara tersebut mendapatkan berbagai keuntungan. Indonesia mendapatkan 90 miliar dollar persen yang mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Serta Jepang yang dapat menghasilkan lapangan pekerjaan baru untuk rakyatnya (Putralisindra, 2017). Kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan Jepang melalui diplomasi pariwisata ini bertujuan untuk memperbaiki citra Jepang di wilayah Asia dan Barat. Jepang ingin menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa ia ingin menciptakan hubungan yang baik serta menguntungkan untuk Indonesia. Terlebih masih banyak rakyat Indonesia yang menjadi korban hidup di masa penjajahan Jepang.

Megawati melakukan pertemuan dengan PM Junichiro Koizumi pada 23 Juni 2003 di Tokyo. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk melakukan persiapan terbentuknya kemitraan ekonomi Indonesia dan Jepang (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, n.d.). Kemitraan tersebut nantinya akan diberi nama IJEPA (*Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement*). Kemitraan ini merupakan kerja sama yang berfokus pada bidang industri dan investasi (Tjahajana, 2006).

Hubungan bilateral Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jepang dimulai adanya penandatanganan secara resmi dengan Perdana Menteri Jepang yaitu Shinzo Abe pada 28 November 2006. Indonesia dan Jepang memainkan perannya masing-masing dalam rangka saling memenuhi kebutuhan kedua negara tersebut. Indonesia membutuhkan Jepang sebagai

investor ataupun pemberi pinjaman. Sedangkan Jepang membutuhkan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan industri seperti nikel, gas alam, dan batu bara. 20 Agustus 2007 IJEPA (*Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement*) disetujui oleh Indonesia dan Jepang. IJEPA bertujuan untuk meningkatkan volume perdagangan serta memberikan fasilitas investasi Jepang di Indonesia. Pada masa SBY juga Indonesia menjadikan Jepang sebagai negara tujuan ekspor terbesar kedua untuk kategori hasil industri (Saputra, n.d.).

Jepang sangat diuntungkan dalam IJEPA. IJEPA membuat perjanjian berupa penghapusan tarif atau penurunan tarif bea masuk dalam jangka waktu tertentu. Perjanjian tersebut memberikan keuntungan kepada Indonesia. Indonesia tidak perlu untuk mengeluarkan biaya yang besar dalam melakukan ekspor ke Jepang. Namun Jepang justru mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah ekspor komoditi minyak bumi dan batu bara yang akan semakin membantu pemenuhan kebutuhan bahan bakar untuk proses produksi. Lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia juga semakin meningkat, hal ini sejalan dengan meningkatnya perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia. IJEPA mendorong perusahaan-perusahaan Jepang untuk menanamkan sahamnya di Indonesia. Kerugian lainnya yang diterima Indonesia adalah keberadaan kebijakan USDFS (*User Specific Duty Free Scheme*), yaitu kebijakan yang mengatur pembebasan bea masuk komoditi baja untuk perlengkapan kendaraan ke Indonesia. Hal ini

membuat berbagai otomotif dari Jepang merajai pasar otomotif Indonesia (Arishanti, 2019).

Selain adanya kerja sama di bidang ekonomi, Indonesia dan Jepang juga bekerja sama di bidang lingkungan hidup. Jepang memberikan bantuan kepada Indonesia melalui ODA untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Bantuan ini berbentuk pinjaman anggaran iklim kepada Indonesia yang diberikan secara berkala. Kerja sama ini memiliki nama *Cool Earth Partnership*. Jepang menyiapkan dana JPY 500 miliar yang nantinya akan diberikan kepada negara-negara berkembang untuk menjalankan program mitigasi pemanasan global (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2008). Jepang merupakan salah satu negara penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia. Hal tersebut membuat Jepang harus mencegah adanya peningkatan pemanasan global. Jepang memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang dalam rangka memenuhi kewajibannya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Jika negara yang mendapatkan bantuan ini berhasil mengurangi emisi gas karbon, hal tersebut juga menjadi keberhasilan bagi Jepang dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (Sundari, 2021).

Presiden SBY memandang Jepang sebagai *partner* penting untuk Indonesia. Berbagai kerja sama di beberapa bidang seperti ekonomi, lingkungan, sosial, dan keamanan non tradisional dilakukan oleh Indonesia dan Jepang. Indonesia dan Jepang saling membantu satu sama lain dalam meningkatkan kerja sama dengan negara lainnya. Jepang bersedia untuk membantu Indonesia dalam menghadapi berbagai pembangunan guna untuk

meningkatkan perekonomian (Pusat Komunikasi Publik Kementerian PUPR, 2007). Walaupun di balik berbagai bantuan yang Jepang berikan kepada Indonesia, terdapat berbagai maksud dan tujuan tertentu yang ingin diraih oleh Jepang.

Hubungan Indonesia dan Jepang berjalan dengan baik seiring berjalannya waktu. Di masa kepemimpinan Joko Widodo berbagai pembangunan serta kehidupan sosial Indonesia mendapatkan bantuan finansial dari Jepang. Pembangunan infrastruktur menjadi fokus Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo. Indonesia melakukan berbagai pembangunan infrastruktur dengan bantuan Jepang, harapannya melalui pembangunan tersebut perekonomian Indonesia akan semakin menguat. Jepang membantu Indonesia dalam mencapai poros maritim dunia. Hal ini terlihat dari adanya bantuan Jepang dalam pengembangan perikanan terpadu di pulau terluar Indonesia yaitu Sabang dan Morotai. Indonesia juga mendukung Jepang dalam komitmennya untuk membantu rakyat Palestina. Indonesia dan Jepang bekerja sama dalam memberikan bantuannya kepada Palestina dalam program *CEAPAD (Cooperation Among East Asian Countries for Palestinian Development)* (BPMI Setpres, 2018).

Pada masa penyebaran Covid-19, Jepang memberikan bantuannya berupa pinjaman kepada Indonesia sebesar 50 miliar yen atau setara dengan RP 6,95 triliun. Pinjaman ini ditujukan untuk melakukan penanganan pandemi Covid-19. Pinjaman ini disampaikan oleh PM Jepang Yoshihide Suga dalam pertemuannya dengan presiden Joko Widodo pada 2020 lalu. Di

dalam pertemuan tersebut juga disampaikan oleh Joko Widodo akan harapannya kepada Jepang, untuk membantu Indonesia dalam mempermudah izin impor produk pertanian, kehutanan, dan perikanan Indonesia (Indonesia Defense, 2020).

Jepang juga ikut serta dalam memberikan bantuan secara finansial dan teknis pembangunan *Mass Rapid Transit* (MRT) di Jakarta. Pembangunan MRT ini bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan nasional Indonesia. Diharapkan dengan adanya MRT ini mampu untuk mendorong kemakmuran ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Pembangunan MRT sebenarnya sudah terencana sejak tahun 1984, namun keterbatasan dana serta kurangnya keseriusan dari pemerintah membuat pembangunan MRT di Indonesia baru berjalan di tahun 2013. Jepang memberikan pinjaman Yen dalam jangka waktu ringan serta tingkat bunga rendah kepada Indonesia. Selain pinjaman finansial, Jepang juga mengirimkan berbagai tenaga ahli serta teknologinya (Firmansyah dan Pujiyono, n.d.). Bantuan yang diberikan Jepang kepada Indonesia dalam pembangunan MRT senilai Rp 13 triliun dengan pengembalian selama 30 tahun dan bunga 0,4% (Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2011).



Gambar 2.2: Dari kiri ke kanan terdapat Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia (Masafumi Ishii) – Menteri Luar Negeri Jepang (Toshimitsu Motegi) – Direktur Utama MRT Jakarta (William P. Sabandar).

Sumber: MRT Jakarta Dinilai Proyek Terbaik Jepang-Indonesia, Republika.co.id, 2020.

Di tahun 2018 Indonesia dan Jepang bekerja sama dalam pembangunan sektor perikanan di beberapa pulau terluar Indonesia. Jepang memberikan bantuan hibah pada program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di enam pulau terluar Indonesia senilai 2,5 miliar Yen atau senilai Rp 324 miliar (Fajar, 2018b). Hibah Jepang akan pembangunan SKPT terbagi menjadi dua tahap, tahap pertama terjadi di tahun 2018 sedangkan untuk tahap kedua terjadi di tahun 2021. Di tahap kedua Jepang memberikan hibah senilai 3 miliar Yen (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2021a). Keseriusan pemerintah Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia mendapat dukungan dari pemerintah Jepang. Melalui

pemberian bantuan hibah dalam pembangunan SKPT menjadi tanda dukungan Jepang akan tujuan Indonesia tersebut.

Di era modern seperti saat ini seringkali Indonesia menjadi lahan persaingan berbagai negara maju dalam mengedepankan politik serta ekonominya. Jepang yang merupakan kawan lama Indonesia seringkali menunjukkan berbagai kepentingan nasionalnya dalam melaksanakan kerja sama dengan Indonesia. Pembangunan MRT merupakan pendapatan jangka panjang bagi Jepang. Hal ini karena Jepang memberikan kemudahan bagi Indonesia untuk mengembalikan dana tersebut. Dalam bidang politik, proyek MRT menjadi persaingan antara Jepang dan Tiongkok. Jepang dan Tiongkok saling bersaing untuk melakukan pembangunan perkeretaan di wilayah Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Indonesia (Farid, 2021).

Dalam pemberian hibah Jepang kepada Indonesia untuk pembangunan sektor perikanan terpadu menjadi jalan bagi Jepang untuk mendapatkan sumber daya ikan. Jepang merupakan salah satu negara yang mayoritas masyarakatnya mengkonsumsi ikan, hal tersebut mendorong Jepang untuk mendapatkan kerja sama di bidang perikanan. Bantuan hibah ini justru mendorong Indonesia untuk tidak berfokus pada bahan mentah saja namun juga mampu untuk mengelola bahan-bahan tersebut. Sehingga keuntungan yang didapat oleh Jepang dan Indonesia akan mencapai kesetaraan (Fajar, 2018b).

Berjalannya waktu membuat hubungan politik serta ekonomi antara Indonesia dan Jepang semakin terlihat kuat. Berbagai kerja sama di bidang ekonomi, budaya, lingkungan, dan kemaritiman terjalin di antara keduanya. Namun berbagai kerja sama tersebut seringkali memberikan keuntungan yang timpang. Jepang justru lebih banyak mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik di dalam kerja samanya dengan Indonesia. Jepang menggunakan kesempatannya untuk ikut serta dalam pembangunan Indonesia untuk memenuhi kepentingan nasionalnya.

2.3 Tujuan Bantuan Luar Negeri Jepang di Indonesia

Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membuatnya mampu untuk menjadi negara yang lebih kuat dari sebelumnya. Perjanjian San Francisco mendorong Jepang untuk bangkit dan mengubah kebijakan nasional maupun strategi hubungan internasionalnya. Perdana Menteri Shigeru Yoshida memilih untuk fokus terhadap pembangunan ekonomi dibandingkan militer untuk Jepang. Hal ini disebabkan adanya kewajiban Jepang untuk membayar pampasan atas kerugian Perang Dunia II yang akan diberikan kepada negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Filipina. Jepang mengharapkan adanya perbaikan hubungan politik maupun ekonomi di antara Jepang dan negara-negara Asia Tenggara tersebut. Colombo Plan menjadi awal keikutsertaan Jepang ke dalam organisasi pembangunan ekonomi dan sosial di Asia Pasifik. Bantuan luar negeri pertama Jepang yang diberikan melalui Colombo Plan terjadi pada tahun 1954. *Official Development Assistance* (ODA) menjadi instrumen penting bagi Jepang

dalam kemajuan perekonomian. ODA juga menjadi pendukung Jepang dalam membangun hubungan bilateral dengan berbagai negara yang pernah dijajahnya.

Jepang menggunakan strategi pemberian bantuan luar negeri serta membangun kerja sama di bidang ekonomi untuk membangun hubungan bilateral dengan berbagai negara. Bantuan luar negeri yang telah diberikan Jepang kepada Indonesia dari masa kepemimpinan Soekarno hingga Joko Widodo terlihat adanya tujuan yang ingin dicapai. Jepang menginginkan keuntungan ekonomi serta pemenuhan sumber daya alam. Jepang melakukan diplomasi ekonomi di awal kebangkitannya. Kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang juga didominasi oleh kegiatan ekonomi. Terdapat beberapa kerja sama antara kedua negara tersebut yang memiliki tujuan perekonomian seperti JIANT dan IJEPA. Beberapa bantuan luar negeri yang Jepang berikan kepada Indonesia bertujuan untuk mendapatkan sumber daya minyak, nikel, gas alam, batu bara, dan perikanan. Jepang menggunakan kekuatan ekonominya untuk mendapatkan berbagai keuntungan serta memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Kebangkitan Tiongkok menjadi ancaman tersendiri bagi posisi Jepang di wilayah Asia Tenggara. Jepang menggunakan strategi kebijakan bantuan luar negeri untuk mempertahankan pengaruh serta aliansinya di Asia Tenggara. Jepang banyak membangun berbagai kerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN. Kerja sama tersebut bertujuan untuk membuktikan bahwa Jepang lebih baik daripada Tiongkok dalam menyediakan bantuan luar negeri (Trinidad, 2018a). Jepang memiliki tujuan politik dalam berbagai bantuan luar negerinya, terutama bantuan yang ditujukan kepada negara-negara anggota ASEAN. Adanya sengketa

Kepulauan Senkaku mendorong Jepang untuk meningkatkan kedekatannya dengan Asia Tenggara, hal tersebut bertujuan agar mendapatkan dukungan serta mempertahankan kekuatannya.